

**ANG SIMPAN PINJAM PEREMPUAN DI DESA BALET BARU KECAMATAN
SUKOWONO KABUPATEN JEMBER)**

*The Evaluation Of PNPM MPd On 2013-2014
(Case Study Field Of Women In The Village Savings And Loans
Baletbaru Sukowono Sub District Jember)*

Ana Agustina, Agus Suharsono, Hermanto Rohman
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 E-mail: Ana_Agutina17@yahoo.co.id

Abstract

This research aimed to evaluate the PNPM MPd Field of Women Savings and Loan in the Village Balet Baru Sukowono District of Jember. This research used descriptive method with qualitative approach and the focus of this study is on the tuition (SPP) program. Purposive sampling technique was used to get respondents. There are two Data sources; primary data and secondary data. Data collection techniques used; observation, interviews, and documentation methods. This study used a technique authenticity of data with triangulation of data sources. Data were analyzed using an interactive model of Miles and Huberman. The results showed that the evaluation stage PNPM MPd Savings and Loan Sector in Rural Women in Balet baru in 2013-2014; namely the planning stage include socialization, brainstorming, writing proposals, verification, priority proposals MAD, MAD musdes result information. Disbursement and implementation phase covers and Musdes Accountability. While the completion stage refund fees to the CGU. At the planning stage of socialization carried out to follow up activities of MAD socialization, women's groups have determined the proposal of the aspirations that SPP. Recommendations TV SPP's proposal is for the village of New Ballet of 2 groups with a loan amount of USD 66 million, -. At the implementation stage that disbursement of funds directly and a fee of 5% of total loans has completed all the requirements and reporting and in accordance with the planned use of the funds. At the completion stage show that repayment of SPP funds have not been up to the CGU. In the PNPM activities Field SPP MPD is carried out in accordance with the PTO. SPP activity was evaluated based on the criteria of equity, adequacy, accuracy, and community satisfaction. Most are in accordance with the objectives of this program.

Keyword: Evaluation Program, SPP, PNPM MPd

PENDAHULUAN

Programsaa Nasional Pemberdaaaan Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program pembangunan yang berfungsi untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan dan penciptaan tenaga kerja di tingkat pedesaan dan perkotaan yang diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2007.

Adanya PNPM MPd ini dikeluarkan Keputusan Menteri Koordinator bidang kesejahteraan rakyat No.25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007. Tentang pedoman umum program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM Mandiri). Yang merupakan suatu program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan berbasis pemberdayaan kepada masyarakat miskin yang salah satu komponen programnya yaitu BLM (Bantuan Langsung Masyarakat).

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme progam pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di Perdesaan. Program ini untuk mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di Perdesaan. Sebagaimana juga kebijakan yang telah dirumuskan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 299/PMK.02 2012 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program atau Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2013 Dengan Sumber Dana Dari Sisa Anggaran Program atau Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2012 Bab I Pasal I yang berbunyi "PNPM Mandiri Perdesaan adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di Perdesaan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan diperlukan adanya kebijakan yang mengatur tentang langkah-langkah teknis di lapangan. Oleh karena itu, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan tentang kebijakan yatiu aturan yang harus dipakai dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang disebut dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

Kegiatan SPP merupakan salah satu jenis kegiatan yang secara nyata menunjukkan adanya keseriusan dari PNPM Mandiri untuk memprioritas pemberdayaan perempuan. Secara umum kegiatan simpan pinjam perempuan merupakan suatu kegiatan dalam bentuk simpan pinjam, yang semua anggotanya adalah perempuan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan bidang permodalan simpan pinjam perempuan untuk kelompok perempuan merupakan salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Jember. Dengan jumlah desa terdantai berjumlah 226 desa, 4 macet, dan 26 bergulir. Dan salah satunya adalah kecamatan Sukowono desa Baletbaru yang melaksanakan PNPM Mandiri bidang SPP. Kecamatan Sukowono terdiri dari dua belas desa yaitu Desa Sumberwaru, Sukorejo, Sukosari, Baletbaru, Sumberwringin, Mojogemi, Sukokerto, Sukowono, Dawuhan Mangli, Arjasa, Sumberdanti, dan desa Pocongan. Program SPP ini menjadi sangat menarik karena mampu memberikan dampak positif bagi para anggotangnya yang diantaranya adalah:

1. Meningkatkan taraf pendapatan
2. Berkembangnya usaha kecil
3. Penyediaan akses modal bagi kaum perempuan

Dalam penelitian ini daerah yang dijadikan tempat penelitian yaitu Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono. Alasan peneliti mengambil desa ini karena diantara duabelas desa di Kecamatan Sukowono Desa Baletbaru merupakan desa penerima bantuan dana SPP dari Tahun 2007-2012 namun untuk Tahun 2013-2014 desa ini mendapatkan pengurangan bantuan dana SPP hal ini di sebabkan karena adanya penunggakan pengembalian pinjaman.

Desa Balet Baru memiliki dua dusun yaitu dusun sumber gayam dan dusun krajan. Kelompok SPP yang memperoleh dana bantuan di desa Baletbaru yaitu 2 kelompok yang berada di dalam dua dusun, yaitu dusun sumber gayam dan dusun krajan. Berikut jumlah sasaran kelompok di desa Baletbaru yang menjadi terget sasaran penerima bantuan PNPM MPd di Desa Balet Baru Kecamatan Sukowono.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) melalui PNPM Perdesaan. Simpan Pinjam Perempuan merupakan salah satu alternatif pemecahan permasalahan permodalan, bahkan sampai pada bantuan teknis, informasi, teknologi, manajemen, dan pasar. Program tersebut diperuntukkan bagi para wanita yang akan memulai usaha dan bagi wanita yang mempunyai usaha. Perempuan di sini diberikan pinjaman dana (modal) untuk melancarkan usaha yang mereka miliki dan untuk membantu perekonomian keluarga. Dalam bidang SPP ini, semua perempuan dapat mengajukan bantuan dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan dalam peminjaman tidak ada jaminan.

Kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) dinilai cukup berhasil dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil evaluasi audit pengembalian dana pinjaman. Jika program ini dapat berjalan dengan baik, dan hasilnya menunjukkan dampak yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka program ini diharapkan dapat menjadi program unggulan yang harus terus didukung didalam menetapkan kebijakan pembangunan daerah dalam hal penanggulangan kemiskinan. Namun, dalam hal meningkatkan perekonomian rumah tangga miskin program SPP belum mencapai sasaran ini. Oleh karena penelitian ini hanya memfokuskan pada Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melalui PNPM Perdesaan di desa Baletbaru Kecamatan

Sukowono, maka peneliti di sini dirasa juga perlu memaparkan sebuah gambaran bahwa SPP ini juga dapat dikatakan sebagai sebuah program alternatif untuk mengangkat masyarakat khususnya kaum perempuan dari jurang kemiskinan. Mengapa harus perempuan? Hal ini tentu kita sadari bahwa secara garis besar kaum perempuan telah menjadi korban diskriminasi dalam sejarah kehidupan dunia dan hal itu hampir terjadi di setiap negara. Ketertindasan yang terjadi merupakan dampak dari ketidakadilan gender, di mana sosok perempuan selalu hanya dikonstruksikan sebagai ibu rumah tangga yang perannya sebatas mengurus dapur, kasur dan sumur. Mereka tidak pernah diberikan kesempatan yang sama sebagaimana kaum laki-laki untuk mengembangkan potensi dan kreatifitasnya sehingga seakan mereka kehilangan daya kreatifitasnya untuk mengekspresikan kepada dunia bahwa mereka sebagai perempuan pada hakikatnya juga mempunyai hak sama dalam segala hal sebagai kaum laki-laki.

Konstruksi di atas, pada akhirnya berdampak terhadap kesejahteraan rumah tangga mereka khususnya bagi masyarakat perdesaan. Produktivitas para kaum perempuan tergadaikan dan daya kreatifitasnyapun tumpul sehingga mereka tidak dapat memberikan kontribusi untuk membantu ekonomi keluarganya. Mereka hanya bisa berpangku tangan melihat sulitnya para suami mereka dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya, sedangkan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Salah satu hal yang paling mudah dilakukan oleh para perempuan-perempuan desa tersebut dalam rangka membantu meningkatkan pendapatan ekonomi keluaganya yakni dengan membuka usaha, tetapi dalam hal ini permasalahannya adalah pada aspek modal. Rata-rata mereka untuk mempunyai modal yang cukup untuk membuka lahan usaha.

Oleh karena itu, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dirasa sangat perlu untuk senantiasa dilaksanakan sebagai sebuah kebijakan dalam rangka membantu para kaum perempuan untuk membuka lahan usaha demi membantu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Dengan demikian, pada hakikatnya program simpan pinjam khusus perempuan ini dilaksanakan tidak lain adalah untuk memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan mendorong ataupun mengurangi Rumah Tangga Miskin (RTM) serta perluasan penciptaan lapangan kerja khususnya bagi kaum perempuan. Program ini sasaran utamanya adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang ada di masyarakat. Dalam bidang SPP ini, semua perempuan dapat mengajukan bantuan dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) serta dalam peminjaman tidak ada jaminan. Dari program tersebut salah satu dampak dan akibat yang diharapkan tentunya adalah masyarakat dapat dengan mudah memenuhi segala kebutuhan kehidupannya. Begitu juga, dengan usaha yang dilakukan maka mereka telah membantu untuk meringankan beban para suami mereka untuk mengangkat keluarganya dari jurang kemiskinan. Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa dampak dari kinerja program SPP bagi penerima dana (kaum perempuan) adalah mengalami peningkatan taraf hidup. Peningkatan taraf hidup tersebut dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan mereka melalui usaha, meningkatkan peluang lapangan pekerjaan yakni ibu-ibu atau wanita yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan, kini memiliki pekerjaan pokok misalnya sebagai penjahit dan ada juga yang mulai berdagang dan kini mereka mampu untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Pada mata

pencaharian yang memiliki waktu luang dapat membuka usaha dagang kecil-kecilan setelah mengikuti program simpan pinjam perempuan yang mana mereka akan memiliki penghasilan yang sisanya dapat ditabung yang juga dapat digunakan untuk mengembangkan usaha. Perkembangan usaha bagi yang sudah mempunyai usaha juga mengalami peningkatan karena telah memiliki modal dan dapat melakukan inovasi usaha melalui proses pendampingan. Ibu-ibu mengalami pembebasan dari jeratan bank keliling dan tercapainya kebutuhan dasar sosial seperti pendidikan, kesehatan dan peningkatan standar hidup menjadi lebih baik serta peningkatan lapangan pekerjaan.

Mengacu pada semua pemaparan di atas, pada hakikatnya program ini sebagian kecil telah dilakukan mengingat pelaksanaan PNPM sebagai sebuah kebijakan pemerintah telah dikeluarkan sejak tahun 2007. Namun, praktek yang telah terlaksana sejauh ini masih belum maksimal dan masih jauh dari harapan. Hal itu terjadi salah satunya diakibatkan oleh faktor-faktor penghambat yang sejauh ini masih belum diatasi sehingga pencapaian hasil yang diharapkan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang belum maksimal. Faktor yang dimaksud di antaranya dapat berupa aturan pengelolaan pinjaman, jangka waktu peminjaman, aturan pertemuan kelompok, motivasi peserta dalam bergabung ke dalam SPP, koordinasi antara pengelola kegiatan dan penerima dana, pemanfaatan dana yang seringkali masih digunakan terhadap hal-hal yang konsumtif dan

kurangnya pendampingan untuk mengembangkan dan mengawasi kegiatan para peserta. Dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kajian *ex-post evaluation* yang berfokus pada evaluasi yang dilakukan pada saat setelah pelaksanaan program yang berfokus pada evaluasi output atau keluaran-keluaran yang dihasilkan setelah proses pengimplementasian berlangsung.

Di dalam penelitian ini, fokus yang akan diteliti *ex-post evaluation* adalah untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan pelaksanaan program tersebut.

Dari uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :“Bagaimana Proses dan hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Bidang Simpan Pinjam Perempuan di Desa Balet Baru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember?”
sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengevaluasi PNPM MPd Tahun 2013-2014 Bidang Simpan Pinjam Perempuan di Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Secara umum kemiskinan didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Namun demikian, secara luas kemiskinan juga kerap didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan, kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Smeru (DALAM Suharto et.l., 2004).

Ramlan Subakti (dalam santoso, 2003:25) bahwa faktor penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi:

a) Kemiskinan cultural, bukan bersifat bawaan melainkan akibat dari ketidakmampuan menghadapi kemiskinan yang berkepanjangan;

b) Kemiskinan sumber daya ekonomi, melihat akar kemiskinan terletak pada ketidaktunya sumber daya ekonomi;

c) Kemiskinan struktural, melihat bahwa yang menyebabkan kemiskinan yaitu struktur ekonomi dan politik, yang bukan hanya eksploitasi terhadap pihak yang kurang memiliki sumber daya.

Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003). Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya (Foy, 1994)

Memberdayakan orang lain pada hakikatnya merupakan perubahan budaya, sehingga pemberdayaan tidak akan jalan jika tidak dilakukan perubahan seluruh budaya organisasi secara mendasar. Perubahan budaya sangat diperlukan untuk mampu mendukung upaya sikap dan praktik bagi pemberdayaan yang lebih efektif (Sumaryadi, 2005: 105).

Evaluasi

Definisi evaluasi menurut Innayatullah (1980:57-58) merupakan suatu proses yang kompleks yaitu mencari faktor yaitu mencari faktor yang menghubungkan dengan performadan efektifitas suatu program/proyek untuk menentukan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, dengan demikian dapat dikembangkan solusi atau pemecahan dalam pengimplementasian program atau proyek, dan untuk mengembangkan program atau proyek agar dapat lebih efektif lagi dalam pelaksanaan selanjutnya.

Menurut Inayatullah dalam (Chatarina 2011:40). Kegiatan Evaluasi terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Pre-program evaluation*, yaitu evaluasi yang dilakukan sebelum program berjalan
2. *On-going evaluation*, yaitu evaluasi yang dilakukan ada saat program berjalan
3. *Ex-post evaluation*, yaitu evaluasi dapat dilakukan setelah program berjalan.

Berdasarkan tipe evaluasi diatas, penulis menggunakan *ex-post evaluation*, karena dalam penelitian ini peneliti melakukan studi evaluasi yang dilakukan pada saat setelah pelaksanaan program dijalankan yang berfokus pada evaluasi output atau keluaran-keluaran yang dihasilkan setelah proses pengimplementasian berlangsung.

Kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh Mutrofin (2007:80) sebagai berikut:

- 1) *Effectiveness* (efektifitas)
- 2) *Efficiency* (efisiensi)
- 3) *Edequacy* (kecukupan)
- 4) *Equity* (kesamaan atau perataan)
- 5) *Responsiveness* (responsivitas)
- 6) *Appropriateness* (ketepatan atau kelayakan).

PNPM Mandiri Pedesaan Bidang Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan untuk kelompok perempuan merupakan kegiatan dalam PNPM Mpd yang bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan dana pinjaman lunak kepada masyarakat dalam bentuk penambahan modal untuk kegiatan usaha kelompok kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ada di seluruh lokasi PNPM Mandiri Pedesaan.

Tahapan penyaluran dana SPP dibagi menjadi beberapa tahapan, diantaranya

1. Tahap perencanaan
2. Tahap pelaksanaan
3. Tahap penyelesaian

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian deskriptif menurut Maleong, (2006:4) mendeskripsikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Tempat penelitian dilakukan di Desa Balet Baru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Dalam menentukan informasi digunakan teknik *sampling purpose*. Menurut Sugiyono (2011:218) mengemukakan bahwa "*purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu". Informan yang digunakan adalah UPK, TPK dan anggota masyarakat yang mendapatkan bantuan dana program.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam mengenai evaluasi Program PNPM Mpd Bidang Simpan Pinjam Perempuan.

Data yang telah didapatkan dianalisis menggunakan model interaktif. Miles dan Huberman (Sugiyono 2011:247) menyampaikan bahwa model interaktif terdiri atas tiga alur kegiatan, yaitu data yang telah dikumpulkan dipilih dan menggunakan data yang diperlukan, lalu data disajikan dan diberikan kesimpulan.

Data yang telah disajikan di uji keabsahannya dengan melakukan triangulasi sumber data, dengan memilih sumber data yang berkaitan dengan evaluasi PNPM Mpd Bidang SPP.

HASIL PENELITIAN

Kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Ketentuan kelompok yaitu kelompok yaitu kelompok perempuan yang mempunyai ikatan pemersatu dan saling mengenal minimal satu tahun, mempunyai kegiatan telah disepakati, telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana yang diberikan, kegiatan pinjaman masih berlangsung dengan baik mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana, memiliki usaha sendiri diluar usaha keluarga. Dalam pelaksanaan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) ini merupakan beberapa tahapan yaitu pencairan dana, dan tahap penyelesaian yaitu tahap pengembalian dana dari kelompok ke UPK

Pelaksanaan PNPM Mandiri pedesaan bidang simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP)

di Desa Baletbaru Kabupaten Jember dilaksanakan pada tahun 2013-2014 dalam prosesnya dana SPP harus melalui tahap-tahap yang ada dalam PTO PNPM MP yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian.

1. Kriteria Efektifitas

Efektivitas pelaksanaan program SPP dapat dilihat juga dari sejauh mana pelaksanaan program ini mencapai sasaran atau tujuannya. Apabila suatu program dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya maka program tersebut dapat dikatakan efektif, namun sebaliknya apabila suatu program tidak mencapai sasaran yang ditetapkan sebelumnya maka program tersebut tidak efektif. Sasaran dari pelaksanaan program SPP ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja baru. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran program SPP di Baletbaru ini dapat dilihat dari apakah kegiatan SPP ini telah mencapai sasaran kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro bagi rumah tangga miskin (RTM) atau malah sebaliknya dan dapat dilihat juga dari apakah masing-masing kelompok itu mengalami peningkatan usaha yang dilakukan setelah pemberian tambahan modal yang dipinjamkan oleh UPK dan apakah hal tersebut dapat bermanfaat bagi anggota kelompok peminjam atau tidak. Adapun pencapaian sasaran/tujuan dari pelaksanaan program simpan pinjam perempuan di Baletbaru

Berdasarkan temuan dilapangan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap sosialisasi program PNPM MP di Desa Balaetbaru sudah sesuai berdasarkan pedoman penyelenggara dimana dalam pelaksanaan sosialisasi serta pelaksanaan kegiatan selanjutnya seperti penggalan gagasan, penulisan usulan hingga pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknik operasional PNPM MP. Berdasarkan petunjuk teknik operasional menjelaskan bahwa MAD sosialisasi ini dilakukan oleh fasilitator kecamatan (FK) serta perencanaan pembentukan tim pelaksanaan kegiatan (TPK). Selanjutnya sosialisasi ditindak

lanjuti ditingkat desa yaitu musyawarah desa (Mudes) sosialisasi, maksudnya adalah musyawarah tersebut dilaksanakan di tiap-tiap desa berisi tentang sosialisasi hasil dari MAD sosialisasi yaitu pemilihan pelaku ditingkat desa yaitu ketua TPK, sekretaris TPK, bendahara TPK serta pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) baik kader tehnik maupun kader desa masing-masing 1 perempuan dan 1 laki-laki.

Setelah itu, dilaksanakan musyawarah dusun (Musdus) yang berisi tentang panggilan gagasan, penentuan kriteria kemiskina. Jadi dalam musdus ini semua masalah bisa diketahui, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah khusus perempuan (MKP). Didalam MKP ini kaum perempuan diberikan hak istimewa untuk mendapatkan program simpan pinjam khusus kelompok perempuan. Namun yang diwajibkan adalah perempuan yang memiliki kelompok yang telah berdiri minimal 1 tahun serta memiliki usaha sendiri terlepas dari usaha keluarga. Kelompok-kelompok tersebut dilakukan pendataan dan diverifikasi sesuai dengan indikator yang sesuai dengan petunjuk teknis operasional (PTO) yang ada. Kemudian, dilaksanakan musyawarah desa campuran untuk menyamakan pendapat atau usulan dari kaum perempuan dan disepakati untuk menjadi usulan desa tersebut yang nantinya akan dipakai dan dikompetisikan pada musyawarah antar desa prioritas usulan. Untuk dapat dikompetisikan perlu dibuat proposal usulan oleh tim penulis usulan. Setelah proposal dibuat maka diverifikasi oleh tim verifikasi (TV) untuk menentukan kelompok-kelompok yang layak maupun yang tidak layak serta menyeleksi usulan yang dianggap mendesak untuk segera diberikan dana bantuan langsung masyarakat (BLM). Dalam melakukan verifikasi maka TV harus lebih selektif agar diperoleh hasil yang sesuai. Peneliti menemukan permasalahan dilapangan, ada anggota kelompok yang tidak mempunyai usaha tetapi anggota tersebut lolos verifikasi dan mendapat bantuan dana. Oleh karena itu tim verifikasi harus lebih teliti dan selektif dalam mengintrogasi kelompok guna mendapatkan hasil yang tepat.

Selanjutnya diadakan musyawarah antar desa prioritas usulan. Didalam MAD prioritas usulan ini usulan dari tiap-tiap desa dikompetisikan untuk mendapatkan dana bantuan ditetapkan usulan apa saja yang disetujui pada saat musyawarah antar

desa penetapan usulan. Setelah usulan ditetapkan maka dilaksanakan musyawarah desa informasi hasil MAD penetapan usulan. Hal ini dilakukan agar tiap desa mengetahui usulan apa saja yang disetujui dan yang akan mendapatkan bantuan dana program. Dalam MAD prioritas usulan ini pengurus PK juga mulai ditetapkan. Setelah dilakukan tahap perencanaan yang telah disebutkan diatas, maka tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini merupakan tahap pencarian dana. Tahap ini merupakan pencairan dana dari UPK ke anggota kelompok melalui TPK. Dalam pencairan dana untuk kelompok yang mendapatkan bantuan dana SPP tersebut wajib datang tanpa diwakilkan guna mengetahui dan mendata siapa saja anggota kelompok yang mendapatkan dana tersebut serta untuk menjelaskan tentang ketentuan dan syarat yang berlaku dalam pencairan maupun maupun tahap penyelesaian yaitu pembayaran angsuran.

Pendanaan PNPM mandiri bersumber dari

anggaran pendapatan Negara daerah (APBD) serta pendapatan dan belanja Negara (APBN). pendanaan tersebut dilakukan melalui proses penyaluran dan pencairan dana. Pada prinsipnya semua proses terkait dengan penyaluran dan pencairan dana PNPM mandiri pedesaan di kecamatan dikelola dan diadministrasikan oleh unit pengelola kegiatan (UPK), sedangkan kegiatan pengelola dan pengadministrasian di desa dilaksanakan oleh tim pengelola kegiatan (TPK). Penyaluran dana PNPM mandiri pedesaan merupakan tahapan pelaksanaan adalah aliran dana PNPM mandiri pedesaan dari rekening kolektif di UPK ke desa melalui tim pengelola kegiatan (TPK) sesuai dengan rencana kegiatan dan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu.

2. Kriteria Kecukupan

Penilaian terhadap *kriteria adequacy* ditujukan untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian hasil dapat memecahkan suatu masalah. Pada kriteria ini diharapkan pada pelaksanaan program ini dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam desa, kriteria kecukupan menjawab masalah lebih menekankan pada hasil dan tujuan yang dihasilkan dari program tersebut. Dalam program pelaksanaan ini sudah mampu menjawab beberapa masalah dalam bidang penyediaan modal pinjaman diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Wawancara dengan Fasilitator kecamatan mengatakan bahwa:

“program ini sesuai dengan peruntukannya, SPP adalah satu program unag menjadi prioritas mengingat selama ini perempuan yang memiliki usaha mengalami masalah dalam memperoleh modal pinjaman. Dengan adanya program ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat yang ingin memperoleh modal pinjaman dengan bunga ringan”

Hasil temuan dilapangan mengindikasikan bahwa adanya program SPP ini telah disesuaikan dengan kebutuhan dari kaum perempuan yang selama ini mengeluhkan permasalahan permodalan. Selama ini di Desa Baletbaru, kaum perempuan yang ingin memiliki modal harus mengajukan ke Bank dengan disertai jaminan dan agunan. Hal ini menjadi masalah ketika kaum perempuan tidak memiliki jaminan sehingga banyak yang meminjam kepada rentenir dengan bunga yang cukup tinggi, akibatnya adalah usaha mereka tidak berkembang karena kewajiban yang mereka harus selesaikan tidak sama jumlahnya dengan pendapatan yang mereka terima. Dengan adanya program ini sangatlah cukup mengurangi permasalahan masyarakat perempuan yang kesulitan dalam memperoleh pinjaman modal.

3. Kriteria Ketepatan

Penilaian terhadap ketepatangunaan ditujukan untuk mengetahui kegiatan/rencana/kebijaksanaan tersebut memberikan hasil/ keuntungan dan manfaat kepada masyarakat. Standart tingkat keuntungan dan manfaat sangat relatif sesuai dengan system nilai yang berlaku pada masyarakat tersebut. dengan hal ini dapat, melihat ketepatan atau kelayakan suatu program yang menunjukkan pada nilai atau tujuan dari program tersebut. Kegiatan SPP juga dianggap dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan usaha warga yang sudah ada dan menstimulasi warga untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa program SPP sesuai dengan sasaran yang ditetapkan yaitu kelompok perempuan yang memiliki usaha lebih dari 1 tahun. Meski demikian, pada pelaksanaannya ternyata tim verifikasi tidak sepenuhnya turun langsung meninjau usaha tersebut satu persatu, tim ini hanya menyesuaikan dengan rekomendasi ketua kelompok. sehingga banyak dari anggota kelompok yang tidak bisa

mengembalikan pinjamannya. Beberapa penerima program mengalami penunggakan dalam pengembalian pinjaman, bahkan ada yang macet artinya tidak bisa mengembalikan pinjaman sama sekali. Diduga hal ini disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan modal pinjaman yang tanpa menyertakan agunan. Pinjaman tanpa agunan bagi sebagian masyarakat tidak terlalu beresiko karena meski tidak mengembalikan pinjamannya tidak ada barang yang disita dan sebagainya. Karakter masyarakat ini menjadi persoalan sendiri bagi pemerintah Desa Baletbaru. Selain itu, peneliti mendapatkan fakta bahwa jenis usaha yang berbeda akan menghasilkan tingkat pendapatan yang berbeda meskipun modal usaha dan besar pinjaman yang diambil relatif sama. Misalnya saja ketika peneliti meneliti ada responden yang memiliki usaha jahit dan berdagang sayur melakukan pinjaman dengan jumlah yang sama. Namun ternyata pedagang sayur menghasilkan keuntungan yang lebih besar setelah mendapatkan pinjaman modal dibandingkan dengan responden yang memiliki usaha jahit. Dalam usaha jahit, dengan adanya pinjaman modal tidak secara langsung meningkatkan jumlah pelanggan yang berkorelasi terhadap pendapatan yang diterima responden. Dalam jangka panjang, harapan dari program ini adalah masyarakat memiliki kemandirian terutama modal. Modal usaha merupakan salah satu faktor terpenting yang harus dimiliki oleh pengusaha yang baru akan membuka usahanya bahkan untuk usaha yang sudah berjalan cukup lama. Modal usaha itu sendiri bisa diartikan sebagai suatu dana awal atau harta (berupa uang, barang dan sebagainya) yang dapat digunakan dalam proses produksi barang maupun jasa.

4. Kriteria Pemerataan

Penilaian terhadap equity ditujukan untuk melihat manfaat dan biaya dari kegiatan terdistribusi secara proposional untuk aktor-aktor yang terlibat. Serta melihat kemampuan pelaksanaan program sejauh mana dapat menjangkau berbagai kelompok-kelompok masyarakat yang ada pada desa tersebut untuk mengetahui pemerataan program SPP di Desa Baletbaru dilakukan wawancara dengan pihak yang kompeten:

Berdasarkan hasil penelitian memang sesuai dengan PTO yang ditetapkan dalam PNPM MP. Namun dilapangan ternyata beberapa masyarakat

msikin banyak yang tidak mau mengajukan pinjaman dengan alasan malu dan takut tidak bisa mengembalikan pinjaman. Meski informasi ini telah diterima oleh sebagian besar masyarakat namun hanya bebeapa bagian saja yang mengajukan untuk mendapatkan modal pinjaman. Jumlah penerima pinjaman antar dusun tidak sama, smeenatar modal yang diberikan jumlah sama.

5. Kriteria Kepuasan

Penilaian terhadap responsif ditujukan untuk mengetahui hasil rencana/kegutan/kebijaksanaan sesuai dengan prefensi/keinginan dari target. Serta mengetahui sejauh mana pelaksanaan program ini dapat memberikan kepuasan pada masyarakat, sehingga pelaksanaan program ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Respon masyarakat terkait dengan program SPP ini sangatlah beragam.

Dari hasil penelitian yang melibatkan beberapa anggota kelompok dan pengelola di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, sasaran/ tujuan program SPP di Desa Baletbaru ini dapat dikatakan belum berhasil secara sempurna. Dimana ada beberapa kelompok yang terggolong dalam rumah tangga miskin tidak dapat memperoleh bantuan pinjaman dana SPP, hal itu dikarenakan kelompok-kelompok tersebut tidak mempunyai usaha dasar seperti yang disyaratkan oleh pengelola. Tetapi selain itu, dibalik ketidakberhasilan sasaran program SPP tersebut terdapat pula keberhasilan dari adanya program SPP, dimana hal itu dapat ditunjukkan dari adanya kelompok-kelompok yang telah merasa puas dengan adanya dana pinjaman SPP ini, dan itu dapat dilihat dari beberapa usaha yang mereka kelola mengalami peningkatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan beberapa hal mengenai evaluasi PNPM bidang Simpan pinjam perempuan (SPP) di Desa Baletbaru Jember yaitu sebagai berikut:

a. Kriteria Efektifitas

Pada pelaksanaan program PNPM MP telah memenuhi kriteria efektifitas yang ditandai dengan kegiatan program mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Penerima SPP memang sesuai PTO PNPM MP

b. Kriteria Kecukupan

Kriteria kecukupan ditujukan untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian hasil dapat memecahkan suatu masalah. Pada program PNPM MP telah memenuhi kriteria kecukupan karena telah mampu memecahkan permasalahan yang ada dalam desa beberapa masalah desa yaitu dalam bidang penyediaan modal pinjaman.

c. Kriteria Ketepatan

Penilaian terhadap ketepatangunaan ditujukan untuk mengetahui kegiatan/rencana/kebijaksanaan tersebut memberikan hasil/ keuntungan dan manfaat kepada masyarakat. Pada kegiatan SPP juga dianggap dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan usaha warga yang sudah ada dan menstimulasi warga untuk menciptakan lapangan kerja baru sehingga bisa menekan angka kemiskinan.

d. Kriteria Pemerataan

Kriteria ini untuk melihat kemampuan pelaksanaan program sejauh mana dapat menjangkau berbagai kelompok-kelompok masyarakat yang ada pada desa tersebut untuk mengetahui pemerataan program SPP.

e. Kriteria Kepuasan

Pada kriteria ini digunakan untuk mengetahui hasil rencana/kegiatan/kebijaksanaan sesuai dengan preferensi/keinginan dari target. Pada program PNPM MP masyarakat puas karena segala sesuatunya telah disepakati mulai dari biaya pinjaman, beban yang diberikan hingga pola angsurannya, sehingga pelaksanaan program ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Moekijat. 2000. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Bandung: Maju Mundur.

Rustiadi E, Saefulhakim S, Dyah P. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crestprent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

Singarimbun, Masri&Efendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, E 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaa*. Yogyakarta: Guna Media.

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy,. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
Petunjuk Teknik Pelaksanaan PNPM MPd Tahun 2009

DAFTAR PUSTAKA

Amien Rais. M.1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media

Inayatullah, Mathur. K dan. 1980. *Monitoring And Evaluation Of Rural Development: Some Asian Experiences*. Kuala Lumpur, Malaysia: City Press Sdn. Bhd.

KepMenko-KesraNo.25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007. Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (Pnpm Mandiri)

Lexy, Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.